
FRAMING MEDIA ONLINE LOKAL DALAM MEMBENTUK OPINI MASYARAKAT SURAKARTA TERKAIT ORMAS YANG MENYETUJUI PENAMBANGAN (WIUPK)

Gery Subagio¹, Fayza Radiva Ardanavyans²

¹²Department of Communication, University of Slamet Riyadi

*Email Korespondensi: gery.subagio@gmail.com

Abstract:

This research aims to analyze how local online media framing shapes public opinion in Surakarta regarding Nahdlatul Ulama (NU) as an organization supporting mining activities in the special mining business permit areas (WIUPK). The study employs content analysis to identify framing elements in news related to mining permits granted to NU. The findings indicate that media frames the news by emphasizing professionalism, transparency, and inclusivity of government policies, significantly influencing positive public perceptions of NU. Media framing that highlights NU's competence and environmental responsibility further strengthens the organization's positive image in the eyes of the public. Through this framing, the media successfully crafts a narrative that guides public opinion to view NU as an entity that is not only competent in managing natural resources but also committed to environmental and community welfare

Keywords: public opinion, framing, mining business permit areas

Abstrak (Bahasa):

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana framing media online lokal membentuk opini masyarakat Surakarta terhadap Nahdlatul Ulama (NU) sebagai organisasi yang mendukung penambangan di wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK). Studi ini menggunakan metode analisis isi untuk mengidentifikasi elemen framing dari berita-berita terkait izin tambang yang diberikan kepada NU. Temuan penelitian menunjukkan bahwa media membingkai berita dengan menyoroti profesionalisme, transparansi, dan inklusivitas kebijakan pemerintah, yang secara signifikan mempengaruhi persepsi positif masyarakat terhadap NU. Framing media yang menonjolkan kompetensi dan tanggung jawab lingkungan yang ditunjukkan oleh NU juga memperkuat citra positif organisasi ini di mata masyarakat. Melalui framing ini, media berhasil membentuk narasi yang mengarahkan opini publik untuk melihat NU sebagai entitas yang tidak hanya kompeten dalam mengelola sumber daya alam tetapi juga berkomitmen terhadap kesejahteraan lingkungan dan masyarakat.

Kata Kunci: opini publik, pembedaan, perizinan bisnis tambang

Tentang Penulis:

Gery Subagio dan Fayza Radiva Ardanavyans sedang menyelesaikan studi S-1 di Program Studi Ilmu Komunikasi Universitas Slamet Riyadi pada tahun 2024.

PENDAHULUAN

Dalam konteks perizinan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK), terdapat perbedaan pandangan yang cukup tajam antara berbagai organisasi masyarakat (ormas) di Indonesia. Salah satu organisasi yang mendukung perizinan tambang WIUPK adalah Nahdlatul Ulama (NU). NU berpendapat bahwa penambangan dapat memberikan manfaat ekonomi yang signifikan bagi masyarakat sekitar, termasuk menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan daerah. Pandangan serupa juga dipegang oleh beberapa fraksi dalam Majelis Ulama Indonesia (MUI), yang melihat potensi keuntungan ekonomi dari penambangan sebagai sesuatu yang dapat mengangkat kesejahteraan masyarakat setempat. Namun, dukungan terhadap WIUPK tidak tanpa kritik. Sejumlah ormas besar lainnya menyuarakan penolakan mereka terhadap perizinan tambang ini, dengan alasan utama adalah kekhawatiran terhadap dampak lingkungan dan sosial. Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia (PGI) menentang izin tambang karena potensi kerusakan lingkungan yang dapat mengakibatkan hilangnya sumber daya alam yang penting dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Selain itu, mereka juga menyoroti dampak sosial yang mungkin timbul, seperti pemindahan paksa komunitas lokal dan pelanggaran hak-hak masyarakat adat.

Penolakan terhadap WIUPK juga datang dari organisasi lingkungan seperti Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI). WALHI menekankan bahwa kegiatan penambangan sering kali membawa dampak buruk terhadap lingkungan, termasuk deforestasi, pencemaran air, dan degradasi tanah. Organisasi ini juga mengkritik kurangnya transparansi dan partisipasi publik dalam proses perizinan tambang, yang mereka anggap sebagai bentuk pengabaian terhadap hak-hak masyarakat untuk berpartisipasi dalam keputusan yang mempengaruhi lingkungan hidup mereka.

Perbedaan pandangan ini mencerminkan kompleksitas isu perizinan tambang di Indonesia. Di satu sisi, ada harapan untuk memanfaatkan sumber daya alam guna mendorong pembangunan ekonomi. Di sisi lain, ada kekhawatiran yang mendalam mengenai dampak negatif yang mungkin ditimbulkan terhadap lingkungan dan komunitas lokal. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media online lokal di Surakarta membingkai isu ini dan membentuk opini publik tentang posisi NU sebagai ormas yang mendukung WIUPK, serta melihat bagaimana framing media mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap isu penambangan.

Dalam penelitian ini, media online lokal Solopos dan Tribun Jateng dipilih sebagai sumber utama untuk analisis framing isu WIUPK dengan timeline 3 juni - 9 juni 2024. Solopos merupakan salah satu media lokal terkemuka di Surakarta yang dikenal luas oleh masyarakat setempat. Media ini memiliki jangkauan pembaca yang signifikan di wilayah Surakarta dan sekitarnya, sehingga berita yang disajikan oleh Solopos memiliki potensi besar dalam membentuk opini publik di kawasan tersebut. Selain itu, Solopos sering kali menyajikan berita dengan fokus lokal yang mendalam, sehingga memungkinkan peneliti untuk mendapatkan perspektif yang lebih spesifik tentang isu-isu yang relevan bagi masyarakat Surakarta.

Tribun Jateng, di sisi lain, merupakan bagian dari jaringan media Tribun Network yang memiliki reputasi kuat di berbagai kota di Jawa Tengah. Dengan basis pembaca yang luas dan beragam, Tribun Jateng memiliki kemampuan untuk menjangkau berbagai lapisan masyarakat dan menyajikan berita dari berbagai sudut pandang. Pilihan ini memungkinkan penelitian untuk mendapatkan gambaran yang lebih komprehensif tentang bagaimana isu WIUPK dibingkai oleh media yang memiliki pengaruh signifikan di tingkat lokal. Dengan menganalisis berita dari kedua media ini, penelitian dapat memperoleh wawasan yang lebih kaya tentang dinamika framing media dan dampaknya terhadap opini publik di Surakarta. Pemilihan kedua media ini juga didasarkan pada keandalan dan kredibilitas mereka dalam menyajikan berita. Baik Solopos maupun Tribun Jateng dikenal dengan liputan berita yang

cepat dan akurat, serta memiliki tim jurnalis yang berpengalaman dalam mengulas isu-isu lokal dengan detail. Keberagaman dalam pendekatan pemberitaan dan audiens yang luas membuat kedua media ini menjadi pilihan yang tepat untuk analisis framing dalam konteks lokal Surakarta.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana media online lokal, seperti Solopos dan Tribun Jateng, membingkai dukungan Nahdlatul Ulama (NU) terhadap penambangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memahami bagaimana framing oleh media tersebut mempengaruhi opini masyarakat Surakarta terkait isu ini.

LANDASAN TEORITIK

Bagian ini akan membahas landasan teori yang menjadi dasar penelitian tentang bagaimana media online lokal membingkai dukungan Nahdlatul Ulama (NU) terhadap penambangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK) dan dampaknya terhadap opini masyarakat Surakarta. Pembahasan ini mencakup kerangka teori, penelitian terdahulu, metodologi penelitian, dan kerangka konseptual yang digunakan dalam penelitian ini. Kajian teoritis dalam penelitian ini mencakup teori utama dan teori pendukung yang relevan dengan framing media dan pembentukan opini publik. Teori utama yang digunakan adalah Teori Framing dari Erving Goffman yang menekankan bagaimana media membingkai informasi dan bagaimana bingkai tersebut mempengaruhi persepsi dan interpretasi audiens.

Menurut Goffman, framing adalah cara media menyajikan berita dengan menyoroti aspek-aspek tertentu dari suatu isu, sehingga membentuk pemahaman dan interpretasi audiens. Teori ini relevan dalam konteks penelitian ini karena media memiliki peran penting dalam membentuk opini masyarakat mengenai isu-isu sensitif seperti penambangan yang melibatkan organisasi masyarakat keagamaan seperti Nahdlatul Ulama (NU). Selain teori framing, penelitian ini juga menggunakan Teori Agenda Setting dari Maxwell McCombs dan Donald Shaw yang menyatakan bahwa media tidak hanya mengarahkan perhatian publik pada isu-isu tertentu tetapi juga mempengaruhi cara pandang publik terhadap isu-isu tersebut. Dalam konteks ini, agenda setting dapat membantu memahami bagaimana media memilih untuk meliput isu tambang yang melibatkan NU dan bagaimana hal ini mempengaruhi persepsi masyarakat.

Pertama, teori framing yang dikemukakan oleh Erving Goffman akan digunakan untuk memahami bagaimana media membingkai suatu isu dan bagaimana framing ini mempengaruhi persepsi publik. Menurut Goffman, framing adalah cara media memilih dan menekankan aspek-aspek tertentu dari realitas untuk membentuk interpretasi yang diinginkan. Dalam konteks ini, framing dapat memengaruhi bagaimana masyarakat memandang ormas yang terlibat dalam pengelolaan tambang, apakah mereka melihatnya sebagai tindakan positif atau negatif tergantung pada bagaimana media menyajikan informasi tersebut.

Kedua, teori agenda setting yang diperkenalkan oleh McCombs dan Shaw akan membantu menjelaskan bagaimana media menetapkan agenda publik dengan menyoroti isu-isu tertentu dan mengabaikan yang lain. Teori ini relevan dalam penelitian ini karena media memiliki kekuatan untuk menentukan isu-isu apa yang dianggap penting oleh publik. Dengan memberikan perhatian besar pada keterlibatan ormas dalam pengelolaan tambang, media dapat mempengaruhi persepsi masyarakat tentang pentingnya topik ini dalam diskursus publik.

Ketiga, konsep opini publik menurut Walter Lippmann akan digunakan untuk memahami bagaimana persepsi dan pandangan masyarakat dipengaruhi oleh representasi media. Lippmann berpendapat bahwa opini publik terbentuk berdasarkan gambar-gambar dalam pikiran kita yang diciptakan oleh media. Dalam hal ini, bagaimana media menggambarkan ormas keagamaan dalam konteks pengelolaan tambang dapat membentuk

opini masyarakat mengenai legitimasi dan efektivitas peran ormas dalam kegiatan tersebut. Selain itu, teori keterlibatan stakeholder juga akan diintegrasikan untuk menganalisis bagaimana berbagai pihak yang berkepentingan, termasuk masyarakat, pemerintah, dan ormas itu sendiri, berinteraksi dan mempengaruhi satu sama lain dalam isu pengelolaan tambang. Teori ini membantu memahami dinamika dan konflik yang mungkin timbul dari kebijakan ini, serta bagaimana media dapat mempengaruhi persepsi dan tindakan para stakeholder. Dengan menggabungkan teori-teori ini, penelitian ini akan menyediakan kerangka analisis yang komprehensif untuk mengeksplorasi bagaimana media membingkai keterlibatan ormas dalam pengelolaan tambang dan dampaknya terhadap opini publik di surakarta. Analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang peran media dalam membentuk persepsi masyarakat terhadap isu-isu kebijakan publik dan peran ormas dalam pembangunan nasional.

Tinjauan literatur ini akan mengkaji penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan topik ini. Beberapa studi telah menunjukkan bahwa media memiliki peran penting dalam membingkai isu-isu kontroversial. Misalnya, penelitian oleh entman (1993) menemukan bahwa framing media dapat mempengaruhi cara masyarakat memahami dan merespons isu-isu politik. Studi lain oleh iyengar (1991) menunjukkan bahwa framing masalah sosial dapat mempengaruhi tanggapan emosional dan kebijakan publik. Selain itu, penelitian oleh gamson dan modigliani (1989) menyoroti bagaimana framing media tentang risiko lingkungan dapat membentuk opini publik dan tindakan kolektif. Penelitian oleh hansen (2010) tentang media dan isu lingkungan menawarkan wawasan mendalam tentang bagaimana media membingkai isu-isu lingkungan dan dampaknya terhadap kesadaran serta tindakan publik. Penelitian ini meneliti berbagai cara media mempresentasikan isu-isu lingkungan, mulai dari penggunaan narasi, pemilihan gambar, hingga penyajian data ilmiah. Hansen menemukan bahwa media sering kali menggunakan framing tertentu untuk menarik perhatian publik, misalnya dengan menyoroti ancaman lingkungan yang mendesak atau menekankan solusi yang mungkin diterapkan.

Studi ini menunjukkan bahwa framing media memiliki pengaruh yang signifikan terhadap cara publik memahami dan merespons isu-isu lingkungan. Misalnya, ketika media menekankan urgensi dan bahaya perubahan iklim, publik cenderung lebih sadar akan isu tersebut dan lebih mungkin mengambil tindakan, seperti mendukung kebijakan lingkungan atau mengubah perilaku pribadi untuk mengurangi jejak karbon. Selain itu, hansen juga menemukan bahwa media memiliki kekuatan untuk mengatur agenda publik terkait isu-isu lingkungan. Dengan memilih untuk meliput topik tertentu secara intensif, media dapat meningkatkan visibilitas isu tersebut dan menjadikannya prioritas dalam diskusi publik. Namun, hansen juga mencatat bahwa media kadang-kadang bisa memberikan gambaran yang menyederhanakan atau bahkan menyesatkan tentang isu lingkungan, yang dapat menyebabkan miskonsepsi di kalangan masyarakat. Secara keseluruhan, penelitian hansen menegaskan pentingnya peran media dalam membentuk pemahaman publik mengenai isu-isu lingkungan. Media tidak hanya menyampaikan informasi, tetapi juga membingkai isu-isu ini dengan cara yang mempengaruhi persepsi dan tindakan publik. Oleh karena itu, penting bagi media untuk menyajikan informasi lingkungan dengan cara yang akurat dan bertanggung jawab, agar dapat mendukung kesadaran dan tindakan yang positif di kalangan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan analisis framing. Data diperoleh dari artikel berita yang dipublikasikan oleh media online lokal, yaitu Solopos dan Tribun Jateng, yang membahas dukungan Nahdlatul Ulama (NU) terhadap penambangan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Khusus (WIUPK).

Langkah pertama dalam penelitian ini yaitu dengan mengumpulkan artikel berita - berita yang relevan dari situs berita dari web Solopos dan Tribun Jateng dalam periode waktu

tertentu. Kemudian setelah data terkumpul, penelitian ini dilanjutkan dengan menganalisis teks berita untuk mengidentifikasi elemen-elemen framing, seperti judul, pilihan kata, kutipan, dan struktur narasi. Analisis ini akan fokus pada frame yang digunakan oleh media untuk menggambarkan dukungan NU terhadap WIUPK.

Hasil dari analisis framing ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang bagaimana cara media lokal membingkai isu kontroversial dan bagaimana hal ini mempengaruhi persepsi publik. Dengan demikian, penelitian ini dapat berkontribusi pada pemahaman tentang peran media berita dalam membentuk opini masyarakat terkait isu-isu penting yang sedang hangat dibicarakan masyarakat. Serta menunjukkan bahwa berita di media web juga sangat berpengaruh dalam pembentukan opini masyarakat atau publik.

Objek penelitian ini adalah berita-berita yang diterbitkan oleh media web online lokal mengenai pemberitaan tentang izin tambang batubara oleh PBNU di Kalimantan Timur. Dengan batasan penelitian ini meliputi periode waktu tertentu dan media yang diteliti untuk memastikan data yang diperoleh relevan dan terfokus dalam pembahasan. Secara keseluruhan, penelitian ini dapat mengetahui bagaimana opini publik dapat dibentuk melalui berita-berita yang disajikan oleh media online web lokal serta memperkuat opini masyarakat terhadap isu-isu pemberitaan tentang izin tambang batubara oleh PBNU di Kalimantan Timur.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Analisa Framing Berita: "Isi PP 25/2024 yang Diteken Jokowi: Ormas Diberi Wewenang Kelola Tambang"

1. Pendahuluan

Analisis framing bertujuan untuk memahami bagaimana media membingkai suatu isu dan bagaimana framing ini mempengaruhi persepsi publik. Dalam analisis ini, kita akan melihat bagaimana Solopos membingkai berita tentang kebijakan pemerintah yang memberikan wewenang kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan untuk mengelola tambang mineral dan batu bara (minerba). Analisis ini akan mengidentifikasi elemen-elemen framing seperti judul, pilihan kata, kutipan, dan struktur narasi yang digunakan dalam berita tersebut.

2. Elemen Framing

- Judul dan lead

Judul: "Isi PP 25/2024 yang Diteken Jokowi: Ormas Diberi Wewenang Kelola Tambang"

- Lead: Menyampaikan inti berita bahwa Presiden Joko Widodo telah menandatangani peraturan yang memberikan izin kepada ormas keagamaan untuk mengelola tambang. Judul dan lead menekankan kebijakan baru yang diambil oleh pemerintah dan tujuan pemberian izin tersebut.

- Pilihan Kata dan Kutipan

Pilihan Kata: Berita menggunakan kata-kata seperti "resmi menerbitkan izin", "wewenang", dan "mendorong pemberdayaan" untuk menggambarkan situasi. Kata "resmi" menekankan otoritas keputusan, sementara "wewenang" dan "pemberdayaan" menunjukkan tanggung jawab dan tujuan positif kebijakan.

- Kutipan: Kutipan dari Pasal 83A PP 25/2024 yang menegaskan bahwa WIUPK dapat dilakukan penawaran secara prioritas kepada ormas keagamaan. Kutipan ini menekankan landasan hukum dan prinsip keadilan dalam kebijakan tersebut.

- Struktur Narasi

Narasi: Berita ini memiliki struktur narasi yang menjelaskan isi dan tujuan PP 25/2024, dimulai dengan pengumuman penerbitan izin, diikuti dengan penjelasan tentang ketentuan baru terkait WIUPK, dan ditutup dengan ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan tambang oleh ormas keagamaan.

-
3. Pendukung dan Penentang: Berita ini mencakup pandangan dari pemerintah mengenai tujuan kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan pemberdayaan ormas, serta penekanan pada kepemilikan saham mayoritas oleh ormas keagamaan.
 4. Penyajian Pro dan Kontra
 - Pro: Dukungan dari pemerintah yang menegaskan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan ormas keagamaan. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah adil untuk memberikan kesempatan yang sama dalam pengelolaan kekayaan alam.
 - Kontra: Berita ini tidak mencakup penolakan eksplisit dari pihak lain, namun ada implikasi bahwa kebijakan ini dapat menimbulkan tantangan dalam pelaksanaan, seperti persetujuan dari menteri dan kepemilikan saham yang tidak dapat dipindahtangankan.
 5. Interpretasi dan Kesimpulan

Framing dalam berita ini cenderung memberikan pandangan positif terhadap kebijakan pemerintah dalam memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan. Melalui pilihan kata, kutipan, dan struktur narasi, Solopos menyajikan berita ini dengan kerangka yang menekankan pemberdayaan, keadilan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Framing ini penting untuk memahami bagaimana media dapat mempengaruhi persepsi publik tentang kebijakan pemerintah dan peran ormas dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan menekankan landasan hukum, tujuan positif, dan ketentuan yang harus dipenuhi, Solopos membingkai berita ini dalam konteks yang positif dan konstruktif, sekaligus menunjukkan adanya tantangan dalam implementasi kebijakan ini.
- b. PBNU dapat tambang batubara besar setelah Jokowi teken PP minerba ormas keagamaan
1. Pendahuluan

Dalam analisis ini, kita akan melihat bagaimana Tribun Jateng membingkai berita tentang PBNU yang mendapatkan tambang batubara besar setelah Presiden Joko Widodo menandatangani Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2024. Analisis ini akan mengidentifikasi elemen-elemen framing seperti judul, pilihan kata, kutipan, dan struktur narasi yang digunakan dalam berita tersebut.
 2. Elemen Framing
 - Judul dan Lead

Judul: "PBNU Dapat Tambang Batubara Besar setelah Jokowi Teken PP Minerba Ormas Keagamaan"

Lead: Menyoroti tindakan Presiden Jokowi yang memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan, khususnya PBNU. Judul dan lead berfungsi untuk menarik perhatian pembaca dengan menekankan ukuran "besar" dari tambang yang diberikan dan mengaitkannya dengan keputusan presiden.
 - Pilihan Kata dan Kutipan

Berita menggunakan kata-kata seperti "konsesi tambang besar", "janji", dan "bagi-bagi kue" untuk menggambarkan situasi. Kata "janji" yang digunakan oleh Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menekankan komitmen pemerintah kepada PBNU.
 - Kutipan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya yang membantah bahwa izin tersebut adalah bentuk "bagi-bagi kue" dan menegaskan bahwa ini adalah langkah untuk memberikan produktivitas kepada masyarakat melalui ormas.
 - Struktur Narasi
-

Berita ini memiliki struktur narasi yang seimbang dengan menyertakan perspektif yang mendukung dan menentang kebijakan tersebut. Di satu sisi, berita menyampaikan dukungan dari pemerintah dan beberapa tokoh agama, sementara di sisi lain juga memuat kritik dari anggota DPR yang khawatir tentang tata kelola tambang. Narasi diawali dengan penjelasan tentang keputusan presiden dan diikuti dengan komentar dari berbagai pihak untuk memberikan pandangan yang holistik.

3. Penyajian Pro dan Kontra

- Pro: Dukungan dari Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Wakil Ketua MUI Anwar Abbas, dan Ketua Umum PGI Gomar Gultom yang memandang kebijakan ini sebagai terobosan dan bentuk penghargaan kepada ormas yang telah berkontribusi bagi bangsa.
- Kontra: Kritik dari Anggota DPR Mulyanto yang mengkhawatirkan tata kelola tambang yang amburadul dan potensi komoditas transaksi politik.

4. Interpretasi dan Kesimpulan

Framing dalam berita ini cenderung memberikan pandangan yang berimbang dengan menampilkan kedua sisi dari kebijakan pemerintah. Di satu sisi, ada penekanan pada dukungan pemerintah dan ormas terhadap kebijakan ini sebagai langkah produktif dan penghargaan terhadap ormas. Di sisi lain, kritik dan kekhawatiran tentang tata kelola tambang dan potensi transaksi politik juga disoroti.

Melalui pilihan kata, kutipan, dan struktur narasi, Tribun Jateng menyajikan berita ini dengan kerangka yang memungkinkan pembaca untuk melihat berbagai perspektif dan membuat penilaian mereka sendiri tentang kebijakan tersebut. Framing ini penting untuk memahami bagaimana media dapat mempengaruhi persepsi publik tentang isu-isu kontroversial dan kebijakan pemerintah.

c. Dapat konsesi tambang dari pemerintah, Gus Yahya PBNU berterima kasih pada Presiden Jokowi

1. Pendahuluan

Analisis framing bertujuan untuk memahami bagaimana media membingkai suatu isu dan bagaimana framing ini mempengaruhi persepsi publik. Dalam analisis ini, kita akan melihat bagaimana Tribun Jateng membingkai berita tentang PBNU yang mendapatkan konsesi tambang dari pemerintah dan bagaimana Ketua Umum PBNU, Yahya Cholil Staquf, atau Gus Yahya, mengekspresikan rasa terima kasihnya kepada Presiden Joko Widodo. Analisis ini akan mengidentifikasi elemen-elemen framing seperti judul, pilihan kata, kutipan, dan struktur narasi yang digunakan dalam berita tersebut. Gus Yahya berjanji, PBNU akan bertanggung jawab atas konsesi tambang yang diberikan pemerintah dan akan memanfaatkannya dengan sungguh-sungguh. Ia berharap dengan rasa tanggung jawab itu tujuan dari kebijakan afirmasi di sektor tambang akan tercapai.

2. Elemen Framing

- Judul dan Lead

Judul: "Dapat Konsesi Tambang dari Pemerintah, Gus Yahya: PBNU Berterima Kasih pada Presiden Jokowi"

Lead: Menekankan rasa terima kasih dan apresiasi PBNU kepada Presiden Jokowi yang memberikan konsesi tambang. Judul dan lead berfungsi untuk menarik perhatian pembaca dengan menyoroti tindakan positif dari pemerintah dan respon positif dari PBNU.

- Pilihan Kata dan Kutipan

Berita menggunakan kata-kata seperti "berterima kasih", "apresiasi", dan "terobosan" untuk menggambarkan situasi. Kata "berterima kasih" yang

digunakan oleh Gus Yahya menekankan sikap positif dan rasa syukur PBNU terhadap kebijakan pemerintah.

- Kutipan dari Gus Yahya yang menyatakan kesiapan PBNU dalam mengelola konsesi tambang menekankan profesionalitas dan tanggung jawab organisasi tersebut.

- Struktur Narasi

Berita ini memiliki struktur narasi yang menekankan pada apresiasi dan kesiapan PBNU dalam mengelola konsesi tambang. Di satu sisi, berita menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi dari Gus Yahya, sementara di sisi lain juga memuat komentar dari Muhammadiyah yang lebih berhati-hati dalam menerima tawaran tersebut.

Narasi diawali dengan penjelasan tentang apresiasi PBNU kepada Presiden Jokowi dan diikuti dengan komentar dari Gus Yahya mengenai kesiapan PBNU. Selanjutnya, berita ini juga mencakup perspektif dari Muhammadiyah yang menunjukkan pandangan yang lebih berhati-hati.

3. Penyajian Pro dan Kontra

- Pro: Dukungan dari Gus Yahya yang menyatakan bahwa PBNU memiliki sumber daya yang mumpuni untuk mengelola konsesi tambang dan mengapresiasi kebijakan pemerintah sebagai langkah berani dan terobosan penting.
- Kontra: Sikap hati-hati dari Muhammadiyah yang menyatakan bahwa mereka tidak ingin tergesa-gesa dalam mengurus tambang batubara dan akan mempertimbangkan tawaran pemerintah dengan seksama.

4. Interpretasi dan Kesimpulan

Framing dalam berita ini cenderung memberikan pandangan yang seimbang dengan menampilkan kedua sisi dari kebijakan pemerintah. Di satu sisi, ada penekanan pada apresiasi dan kesiapan PBNU dalam mengelola konsesi tambang, sementara di sisi lain juga mencakup sikap hati-hati dari Muhammadiyah yang menunjukkan bahwa tidak semua ormas keagamaan siap untuk menerima tawaran tersebut.

Melalui pilihan kata, kutipan, dan struktur narasi, Tribun Jateng menyajikan berita ini dengan kerangka yang memungkinkan pembaca untuk melihat berbagai perspektif dan membuat penilaian mereka sendiri tentang kebijakan tersebut. Framing ini penting untuk memahami bagaimana media dapat mempengaruhi persepsi publik tentang isu-isu kontroversial dan kebijakan pemerintah.

d. Menteri Bahlil akan terbitkan izin usaha tambang batu bara untuk PBNU

1. Pendahuluan

Analisis framing bertujuan untuk memahami bagaimana media membingkai suatu isu dan bagaimana framing ini mempengaruhi persepsi publik. Dalam analisis ini, kita akan melihat bagaimana Solopos membingkai berita tentang Menteri Investasi Bahlil Lahadalia yang akan menerbitkan izin usaha pertambangan (IUP) untuk Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Analisis ini akan mengidentifikasi elemen-elemen framing seperti judul, pilihan kata, kutipan, dan struktur narasi yang digunakan dalam berita tersebut. Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuka peluang untuk ormas keagamaan dalam mengelola tambang di Indonesia. Hal tersebut tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

2. Elemen Framing

- Judul dan Lead

Judul: "Menteri Bahlil akan Terbitkan Izin Usaha Tambang Batu Bara untuk PBNU"

Lead: Menyampaikan inti berita bahwa Menteri Bahlil Lahadalia akan memberikan izin usaha tambang kepada PBNU dengan alasan untuk mengoptimalkan peran organisasi keagamaan. Judul dan lead menekankan tindakan yang akan dilakukan oleh Bahlil dan tujuan pemberian izin tersebut.

- Pilihan Kata dan Kutipan

Berita menggunakan kata-kata seperti "bangga", "kontribusi", dan "mengoptimalkan" untuk menggambarkan situasi. Kata "bangga" yang digunakan oleh Bahlil menekankan rasa hormat dan kebanggaan terhadap PBNU.

Kutipan dari Bahlil yang menyatakan bahwa proses pemberian izin hampir selesai menekankan kepastian dan komitmen pemerintah dalam merealisasikan kebijakan ini.

Pilihan kata seperti "mengoptimalkan peran organisasi keagamaan" dan "kontribusi bagi pembangunan negara" menunjukkan framing positif terhadap kebijakan tersebut.

- Struktur Narasi

Berita ini memiliki struktur narasi yang menekankan pada keputusan pemerintah dan alasan di balik pemberian izin tambang kepada PBNU. Narasi diawali dengan pernyataan Bahlil mengenai rencana penerbitan izin, diikuti dengan alasan di balik keputusan tersebut dan kutipan dari berbagai pihak yang mendukung kebijakan ini.

Narasi juga mencakup perspektif dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar yang mendukung profesionalisme dalam pengelolaan tambang oleh ormas, serta tanggapan positif dari Gerakan Pemuda (GP) Ansor.

3. Penyajian Pro dan Kontra

- Pro: Dukungan dari Bahlil yang menyatakan kebanggaannya terhadap PBNU dan alasan pemberian izin untuk mengoptimalkan peran organisasi keagamaan dalam pembangunan negara. Selain itu, dukungan juga datang dari Siti Nurbaya Bakar yang menekankan pentingnya profesionalisme dalam pengelolaan tambang oleh ormas.

- Kontra: Tidak ada penolakan eksplisit dalam berita ini, namun ada catatan dari GP Ansor bahwa mereka belum menerima IUP tersebut dan menegaskan pentingnya komunikasi langsung.

4. Interpretasi dan Kesimpulan

Framing dalam berita ini cenderung memberikan pandangan positif terhadap kebijakan pemerintah dalam memberikan izin tambang kepada PBNU. Melalui pilihan kata, kutipan, dan struktur narasi, Solopos menyajikan berita ini dengan kerangka yang menekankan kontribusi dan peran penting ormas dalam pembangunan negara serta kepastian dan komitmen pemerintah dalam merealisasikan kebijakan ini.

Framing ini penting untuk memahami bagaimana media dapat mempengaruhi persepsi publik tentang isu-isu kebijakan pemerintah dan peran ormas dalam pembangunan nasional. Dengan menekankan dukungan dan alasan di balik kebijakan ini, Solopos membingkai berita ini dalam konteks yang positif dan konstruktif.

e. PBNU yakin mampu kelola amanat negara usaha tambang

1. Pendahuluan

Analisis framing ini bertujuan untuk memahami bagaimana Solopos membingkai berita mengenai optimisme PBNU dalam mengelola izin pengelolaan tambang yang diberikan pemerintah. Analisis ini akan mengidentifikasi elemen-elemen framing seperti judul, pilihan kata, kutipan, dan struktur narasi yang digunakan dalam berita tersebut. Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) optimistis mampu mengelola

amanat negara berupa izin pengelolaan pertambangan yang diberikan kepada organisasi masyarakat (ormas) keagamaan.

2. Elemen Framing

- Judul dan Lead

Judul: "PBNU Yakin Mampu Kelola Amanat Negara Usaha Tambang"

Lead: Berita ini dimulai dengan pernyataan optimisme PBNU dalam mengelola izin pengelolaan tambang yang diberikan pemerintah. Judul dan lead menekankan keyakinan PBNU dalam mengemban amanat negara.

- Pilihan Kata dan Kutipan

Pilihan Kata: Kata-kata seperti "optimistis", "mampu", "tanggung jawab moral", dan "kesadaran akan lingkungan hidup" digunakan untuk menggambarkan sikap positif dan bertanggung jawab dari PBNU.

Kutipan: Kutipan dari Ketua Umum PBNU, KH Yahya Cholil Staquf, atau Gus Yahya, menekankan pada kesiapan PBNU dalam mengelola tambang, termasuk jaringan bisnis yang kuat dan kesadaran lingkungan. Kutipan-kutipan ini menonjolkan keyakinan dan komitmen PBNU dalam menjalankan amanat negara.

- Struktur Narasi

Narasi berita ini disusun dengan memberikan informasi tentang keyakinan dan kesiapan PBNU dalam mengelola tambang. Awal narasi fokus pada pernyataan Gus Yahya tentang kemampuan PBNU dalam bidang tambang, diikuti oleh penjelasan tentang langkah-langkah yang telah disiapkan terkait pengelolaan tambang dan kesadaran lingkungan.

Struktur narasi juga mencakup informasi tentang pembentukan badan hukum khusus untuk pengelolaan tambang dan persiapan desain koperasi yang melibatkan warga NU.

3. Penyajian Pro dan Kontra

- Pro: Dukungan dan keyakinan dari Gus Yahya tentang kemampuan PBNU dalam mengelola tambang. Optimisme ini didukung dengan jaringan bisnis yang dimiliki PBNU dan kesadaran lingkungan yang tinggi.

- Kontra: Tidak ada elemen kontra yang disajikan dalam berita ini. Berita fokus pada pandangan positif dan kesiapan PBNU tanpa menampilkan perspektif atau kritik dari pihak lain.

4. Interpretasi dan Kesimpulan

Framing dalam berita ini cenderung memberikan pandangan positif terhadap kesiapan dan kemampuan PBNU dalam mengelola izin tambang yang diberikan pemerintah. Pilihan kata yang optimistis dan kutipan dari Gus Yahya yang menekankan tanggung jawab moral dan kesadaran lingkungan, membingkai PBNU sebagai organisasi yang kompeten dan bertanggung jawab dalam mengemban amanat negara.

Framing ini penting untuk memahami bagaimana media dapat mempengaruhi persepsi publik tentang peran ormas dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan menonjolkan kesiapan dan komitmen PBNU, Solopos membingkai berita ini dalam konteks yang positif dan konstruktif, sehingga mendukung pandangan bahwa PBNU mampu mengelola tambang dengan baik dan bertanggung jawab.

f. Izin-tambang-batubara-yang-diajukan- pbnu-di-kaltim-bakal-terbit-dalam-15-hari-lagi

1. Pendahuluan

Berita ini fokus pada pengajuan izin tambang batubara oleh Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) di Kalimantan Timur dan prosesnya menuju penerbitan izin oleh pemerintah. Analisis framing akan mengeksplorasi bagaimana elemen-elemen seperti judul, pilihan kata, kutipan, dan struktur narasi digunakan untuk membentuk persepsi terhadap PBNU dalam konteks pengelolaan tambang. Kementerian Investasi/Badan

Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan permohonan izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang diajukan oleh PBNU di tambang batu bara Kalimantan Timur, sudah diterima. Apabila memenuhi persyaratan, maka BKPM akan menerbitkan IUPK dalam kurun waktu 15 hari sejak permohonan diterima dan syarat terpenuhi.

2. Elemen Framing

- Judul dan Lead

Judul: "Izin Tambang Batubara yang Diajukan PBNU di Kaltim Bakal Terbit Dalam 15 Hari Lagi"

Lead: Judulnya menyoroti kepastian dan proses pengajuan izin tambang oleh PBNU, menunjukkan antusiasme terkait pengelolaan sumber daya alam yang signifikan.

- Pilihan Kata dan Kutipan

Pilihan Kata: Kata-kata seperti "memroses", "segera", "memenuhi persyaratan", dan "konsesi batubara yang cadangannya cukup besar" digunakan untuk menekankan kecepatan dan pentingnya proses izin serta potensi keuntungan dari pengelolaan tambang.

Kutipan: Kutipan dari Deputy Bidang Pengembangan Iklim Penanaman Modal Kementerian Investasi/BKPM dan Bahlil Lahadalia menyoroti proses administratif dan kebijakan yang mendukung PBNU dalam mengelola tambang. Pernyataan Bahlil juga menekankan pada pentingnya kemitraan untuk pengelolaan yang profesional.

- Struktur Narasi

Artikel ini dimulai dengan menginformasikan proses pengajuan izin oleh PBNU dan kemungkinan penerbitan izin dalam waktu 15 hari setelah persyaratan terpenuhi.

Narasi juga mencakup penjelasan dari Bahlil Lahadalia yang menyoroti kesiapan PBNU dalam mengelola tambang, walaupun mengakui perlunya kemitraan dengan pihak lain yang memiliki spesialisasi.

3. Penyajian Pro dan Kontra

- Pro: Artikel ini mendukung pandangan positif terhadap PBNU sebagai organisasi yang siap dan kompeten dalam mengelola tambang batubara, dengan dukungan dari pemerintah dalam bentuk pemberian izin usaha.
- Kontra: Tidak ada elemen kontra yang disajikan dalam artikel ini; fokusnya adalah pada proses positif dan potensi keberhasilan dari proyek tambang.

4. Interpretasi dan Kesimpulan

Framing artikel ini menggambarkan PBNU sebagai entitas yang optimis dan berkomitmen untuk mengelola sumber daya alam dengan baik, meskipun tidak secara langsung menanggapi kemungkinan keberatan atau kritik dari pihak lain terhadap pengelolaan tambang oleh organisasi keagamaan.

Penggunaan kata-kata positif dan fokus pada proses administratif yang cepat memperkuat naratif tentang kompetensi PBNU dalam mengelola proyek ini.

Artikel ini secara efektif membingkai PBNU dalam konteks yang positif sebagai pemain yang siap dan mampu dalam mengelola izin tambang batubara di Kalimantan Timur. Dengan menonjolkan proses cepat dan dukungan pemerintah, artikel ini membantu membentuk persepsi bahwa PBNU dapat mengemban tugas ini dengan baik dan bertanggung jawab.

g. Ini-jatah-tambang-untuk PBNU

1. Pendahuluan

Berita ini membahas keputusan pemerintah untuk memberikan tambang batu bara eks PT Kaltim Prima Coal (KPC), yang merupakan bagian dari Grup Bakrie, kepada Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU). Analisis framing akan mengeksplorasi bagaimana artikel ini menggunakan elemen-elemen seperti judul, pilihan kata, kutipan, dan struktur narasi untuk membentuk persepsi terhadap pemberian tambang ini kepada PBNU.

2. Elemen Framing

- Judul dan Lead

Judul: "Pemerintah Akan Berikan Tambang Batu Bara Eks KPC kepada PBNU"

Lead: Judulnya langsung menginformasikan kepada pembaca bahwa pemerintah akan memberikan tambang batu bara eks KPC kepada PBNU, menyoroti keputusan yang signifikan dalam konteks pengelolaan sumber daya alam.

- Pilihan Kata dan Kutipan

Pilihan Kata: Kata-kata seperti "memberikan", "diproses", "targetkan terbit", "prioritaskan", dan "membutuhkan" digunakan untuk menekankan langkah-langkah proaktif pemerintah dalam mendukung ormas keagamaan seperti PBNU dalam pengelolaan tambang.

Kutipan: Bahlil Lahadalia, Menteri Investasi/Kepala BKPM, memberikan penjelasan mengenai proses pemberian izin usaha pertambangan kepada PBNU, menunjukkan dukungan penuh dari pemerintah terhadap keputusan ini.

- Struktur Narasi

Berita dimulai dengan pengumuman langsung dari Bahlil Lahadalia tentang keputusan pemerintah untuk memberikan tambang batu bara eks KPC kepada PBNU.

Narasi juga menjelaskan proses administratif yang sedang berlangsung untuk penerbitan izin usaha pertambangan (WIUPK) dan konteks regulasi yang mengatur pemberian WIUPK kepada ormas keagamaan.

3. Penyajian Pro dan Kontra

- Pro: Artikel ini menyoroti keputusan positif pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada PBNU dalam mengelola tambang, menekankan pada dukungan regulasi yang ada dan pentingnya pemberian izin kepada ormas yang membutuhkan.

- Kontra: Tidak ada elemen kontra yang disajikan dalam artikel ini; fokusnya adalah pada dukungan penuh terhadap keputusan pemerintah dan langkah-langkah administratif yang sedang dilakukan.

4. Interpretasi dan Kesimpulan

Framing artikel ini menggambarkan PBNU sebagai penerima yang layak dan kompeten dalam mengelola tambang batu bara eks KPC, dengan dukungan langsung dari pemerintah dalam bentuk regulasi yang mendukung.

Penggunaan kata-kata yang mendukung seperti "prioritaskan" dan "memberikan kepada yang membutuhkan" memperkuat naratif bahwa keputusan ini adalah langkah yang tepat dan mendukung bagi PBNU sebagai ormas keagamaan besar.

Artikel ini secara efektif membingkai keputusan pemerintah untuk memberikan tambang batu bara eks KPC kepada PBNU sebagai langkah positif dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan fokus pada dukungan penuh dari pemerintah dan proses administratif yang sedang berjalan, artikel ini membantu membentuk persepsi bahwa PBNU dapat mengelola tambang ini dengan baik dan bertanggung jawab.

h. Jatah-lahan-tambang-bakal-dilelang-jika-ada-ormas-keagamaan-yang-menolak.

1. Pendahuluan

Analisis framing bertujuan untuk memahami bagaimana media membingkai suatu isu dan bagaimana framing ini mempengaruhi persepsi publik. Dalam analisis ini, kita akan melihat bagaimana Tribun Jateng membingkai berita tentang kebijakan pemerintah untuk melelang lahan tambang jika ada ormas keagamaan yang menolak untuk mengelola. Analisis ini akan mengidentifikasi elemen-elemen framing seperti judul, pilihan kata, kutipan, dan struktur narasi yang digunakan dalam berita tersebut.

2. Elemen Framing

- Judul dan Lead

Judul: "Jatah Lahan Tambang Bakal Dilelang jika Ada Ormas Keagamaan yang Menolak"

Lead: Menyampaikan inti berita bahwa pemerintah akan melelang lahan tambang yang dialokasikan untuk ormas keagamaan jika ormas tersebut menolak untuk mengelola. Judul dan lead menekankan kebijakan pelelangan sebagai konsekuensi dari penolakan oleh ormas.

- Pilihan Kata dan Kutipan

Pilihan Kata: Berita menggunakan kata-kata seperti "menolak", "lelang", dan "kembali kepada negara" untuk menggambarkan situasi. Kata "menolak" menekankan tindakan ormas yang memilih untuk tidak mengambil tanggung jawab, sedangkan "lelang" menunjukkan langkah tegas pemerintah.

Kutipan: Kutipan dari Menteri ESDM Arifin Tasrif yang menegaskan bahwa lahan akan dilelang jika ormas menolak dan menjelaskan ketentuan yang harus dipenuhi oleh ormas untuk mengelola tambang. Kutipan ini menekankan kepastian kebijakan dan persyaratan yang harus dipenuhi.

- Struktur Narasi

Narasi: Berita ini memiliki struktur narasi yang menekankan kebijakan pemerintah dan proses administrasi terkait pengelolaan lahan tambang oleh ormas. Narasi diawali dengan pernyataan Arifin mengenai kebijakan pelelangan, diikuti dengan penjelasan tentang lahan yang disiapkan untuk ormas dan ketentuan yang harus dipenuhi.

Pendukung dan Penentang: Berita ini mencakup perspektif dari Menteri ESDM yang mendukung kebijakan pelelangan sebagai langkah praktis dan tanggapan dari ormas yang menerima dan menolak tawaran tersebut.

3. Penyajian Pro dan Kontra

- Pro: Dukungan dari Menteri ESDM yang menegaskan kepastian dan ketegasan dalam pelaksanaan kebijakan pelelangan. Kebijakan ini dianggap sebagai langkah praktis untuk memastikan bahwa lahan tambang tidak terbengkalai.

- Kontra: Tanggapan dari Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) yang menolak tawaran pemerintah untuk mengelola lahan pertambangan. Penolakan ini menunjukkan adanya ketidaksetujuan terhadap kebijakan atau ketidakmampuan ormas untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

4. Interpretasi dan Kesimpulan

Framing dalam berita ini cenderung memberikan pandangan bahwa kebijakan pemerintah dalam melelang lahan tambang adalah langkah yang tegas dan praktis untuk memastikan lahan tetap produktif. Melalui pilihan kata, kutipan, dan struktur narasi, Tribun Jateng menyajikan berita ini dengan kerangka yang menekankan kepastian, ketegasan, dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh ormas.

Framing ini penting untuk memahami bagaimana media dapat mempengaruhi persepsi publik tentang kebijakan pemerintah dan peran ormas dalam pengelolaan sumber daya alam. Dengan menekankan kebijakan pelelangan sebagai langkah praktis dan tegas, Tribun Jateng membingkai berita ini dalam konteks yang positif dan

konstruktif, sekaligus menunjukkan adanya penolakan dan tantangan dalam pelaksanaan kebijakan ini.

i. Penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan

1. Pendahuluan

Analisis framing bertujuan untuk memahami bagaimana media membingkai suatu isu dan bagaimana framing ini mempengaruhi persepsi publik. Dalam analisis ini, terlihat bagaimana Tribun Jateng membingkai berita tentang penerbitan Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk organisasi masyarakat (ormas) keagamaan oleh Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan. Analisis ini akan mengidentifikasi elemen-elemen framing seperti judul, pilihan kata, kutipan, dan struktur narasi yang digunakan dalam berita tersebut.

2. Elemen Framing

- Judul dan Lead

Judul: "Soal Ormas Kelola Tambang, Luhut: Bisa Konflik Kepentingan kalau Enggak Diawasi Ramai-Ramai"

Lead: Menyampaikan inti berita bahwa seluruh pihak diminta untuk mengawasi penerbitan IUP untuk ormas keagamaan agar tidak terjadi konflik kepentingan.

Judul dan lead menekankan kekhawatiran Luhut tentang potensi konflik kepentingan dan pentingnya pengawasan.

- Pilihan Kata dan Kutipan

Pilihan Kata: Berita menggunakan kata-kata seperti "pengawasan," "niat baik," dan "mengoptimalkan" untuk menggambarkan situasi.

Kutipan: Kutipan dari Luhut yang menyatakan bahwa IUP harus diawasi untuk menghindari konflik kepentingan menekankan perlunya transparansi dan tanggung jawab dalam implementasi kebijakan ini.

Pilihan kata seperti "pengawasan" dan "niat baik" menunjukkan framing yang seimbang antara kehati-hatian dan optimisme terhadap kebijakan tersebut.

- Struktur Narasi

Berita ini memiliki struktur narasi yang menekankan pada keputusan pemerintah dan alasan di balik pemberian izin tambang kepada ormas keagamaan. Narasi diawali dengan pernyataan Luhut mengenai pentingnya pengawasan, diikuti dengan penjelasan tujuan kebijakan oleh Bahlil dan bagaimana kebijakan ini mendapat persetujuan Presiden Jokowi.

Narasi juga mencakup perspektif dari berbagai pihak yang mendukung kebijakan ini, menekankan aspek transparansi, tanggung jawab, dan tujuan positif dari kebijakan tersebut.

3. Penyajian Pro dan Kontra

- Pro: Dukungan dari Luhut yang menekankan niat baik pemerintah dan tujuan untuk membantu masyarakat melalui ormas keagamaan. Bahlil juga menjelaskan tujuan pemberian IUP untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- Kontra: Luhut mengakui adanya potensi konflik kepentingan jika tidak diawasi dengan baik, menunjukkan adanya kesadaran akan potensi masalah dalam implementasi kebijakan ini.

4. Interpretasi dan Kesimpulan

Framing dalam berita ini cenderung memberikan pandangan positif terhadap kebijakan pemerintah dalam memberikan izin tambang kepada ormas keagamaan sambil mengakui adanya potensi tantangan yang perlu diatasi melalui pengawasan yang baik. Melalui pilihan kata, kutipan, dan struktur narasi, Tribun Jateng

menyajikan berita ini dengan kerangka yang menekankan niat baik, kontribusi positif, dan tanggung jawab dalam implementasi kebijakan ini.

Framing ini penting untuk memahami bagaimana media dapat mempengaruhi persepsi publik tentang isu-isu kebijakan pemerintah dan peran ormas dalam pembangunan nasional. Dengan menekankan dukungan dan alasan di balik kebijakan ini, Tribun Jateng membingkai berita ini dalam konteks yang positif dan konstruktif, namun juga mengakui adanya tantangan yang perlu diatasi melalui pengawasan yang baik.

SIMPULAN

Framing media memainkan peran penting dalam membentuk opini masyarakat. Cara berita dipresentasikan dan aspek mana yang ditekankan oleh media dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap suatu isu. Dalam kasus pemberitaan mengenai izin tambang oleh PBNU, media yang berbeda menyoroti aspek-aspek yang berbeda, seperti urgensi penerbitan izin, profesionalisme dalam pengelolaan tambang, dan peran organisasi keagamaan dalam pembangunan nasional.

Menekankan efisiensi dan transparansi pemerintah dalam memroses izin tambang, menggambarkan PBNU sebagai organisasi yang serius dan profesional. Media menyoroti dukungan dari Presiden Jokowi dan beberapa menteri, yang memberikan legitimasi kepada PBNU. Selain itu, dengan menyoroti langkah-langkah yang diambil untuk memastikan kelayakan dan pemenuhan persyaratan administrasi, media berhasil menggambarkan proses ini sebagai langkah yang teratur dan bertanggung jawab. Efek dari framing ini adalah peningkatan citra PBNU di mata masyarakat, yang mulai melihat organisasi ini sebagai entitas yang dapat diandalkan dalam mengelola sumber daya alam, meskipun tanpa pengalaman sebelumnya.

Menekankan aspek strategis dan ekonomis dari kebijakan pemerintah. Dengan menyebutkan bahwa tambang yang akan diberikan kepada PBNU adalah bekas tambang dari Grup Bakrie, framing ini memberikan kesan bahwa pemerintah berusaha mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada. Pemerintah juga digambarkan berkomitmen untuk memberikan kesempatan yang adil kepada ormas besar seperti NU, Muhammadiyah, dan lainnya dalam mengelola tambang, menyoroti inklusivitas dan transparansi dalam kebijakan ekonomi. Framing ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya memberikan izin secara sembarangan, tetapi melakukan proses seleksi yang ketat dan berusaha mendukung organisasi yang telah berkontribusi besar bagi bangsa.

Pengaruh framing ini terhadap opini masyarakat cukup signifikan. Dengan framing yang positif dan menekankan aspek-aspek profesionalisme, transparansi, dan keadilan, masyarakat cenderung melihat kebijakan ini sebagai langkah yang positif. Ini juga meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan PBNU dan ormas lain dalam mengelola usaha tambang secara profesional dan bertanggung jawab.

Dengan demikian, media memiliki peran krusial dalam membentuk persepsi dan opini masyarakat melalui cara mereka membingkai berita dan informasi. Pemilihan sudut pandang, penekanan pada aspek tertentu, dan penggunaan narasi yang strategis dapat secara signifikan mempengaruhi bagaimana masyarakat memahami dan merespons isu-isu penting. Maka dari itu, dengan memahami pengaruh framing media dan mengadopsi rekomendasi yang tepat, media dan pembuat kebijakan dapat berkontribusi pada pembentukan opini masyarakat yang lebih informatif dan konstruktif.

Berdasarkan hasil temuan diatas, dapat dilihat bahwa pemberitaan yang menekankan kolaborasi profesional dan kesiapan PBNU dalam mengelola tambang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan organisasi ini. Framing ini juga memperlihatkan legitimasi kebijakan pemerintah bahwa kebijakan ini adalah keputusan yang

sah dan dipertimbangkan dengan baik, yang dapat meningkatkan dukungan publik. Framing ini juga menyoroti kesadaran lingkungan dan tanggung jawab moral dari PBNU dapat membentuk opini masyarakat bahwa aktivitas pertambangan ini akan dikelola dengan memperhatikan kelestarian lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA

Goffman, E. (1974). *Frame analysis: An essay on the organization of experience*. Harvard University Press.

Lippmann, W. (1922). *Public opinion*. Harcourt, Brace and Company.

McCombs, M., & Shaw, D. L. (1972). The agenda-setting function of mass media. *Public Opinion Quarterly*, 36(2), 176-187. <https://doi.org/10.1086/267990>

Tribun Jateng. (2024, June 4). Soal Ormas Kelola Tambang, Luhut: Bisa Konflik Kepentingan kalau Enggak Diawasi Ramai-Ramai. Retrieved from <https://jateng.tribunnews.com/2024/06/05/izin-tambang-batubara-yang-diajukan-pbnu-di-kaltim-bakal-terbit-dalam-15-hari-lagi>

Solopos. (2024, June 1). Isi PP 25/2024 yang Diteken Jokowi: Ormas Diberi Wewenang Kelola Tambang. Retrieved from <https://news.solopos.com/ini-jatah-tambang-untuk-pbnu-1937164>

Solopos. (2023, November 17). Kondisi tambang galian C yang berada di Desa Gandong, Kecamatan Bringin, Kabupaten Ngawi. Retrieved from <https://news.solopos.com/pbnu-yakin-mampu-kelola-amanat-negara-usaha-tambang-1936338>

Bisnis.com. (2024, June 1). Pemerintah Pusat menawarkan WIUPK kepada badan usaha milik ormas keagamaan. Retrieved from <https://bisnis.solopos.com/menteri-bahlil-akan-terbitkan-izin-usaha-tambang-batu-bara-untuk-pbnu-1933664>

Tribun Jateng. (2024, June 3). Dapat Konsesi Tambang dari Pemerintah, Gus Yahya: PBNU Berterima Kasih pada Presiden Jokowi. Retrieved from <https://jateng.tribunnews.com/2024/06/03/dapat-konsesi-tambang-dari-pemerintah-gus-yahya-pbnu-berterima-kasih-pada-presiden-jokowi?page=all>

Tribun Jateng. (2024, June 3). PBNU Dapat Tambang Batubara Besar Setelah Jokowi Teken PP Minerba Ormas Keagamaan. Retrieved from <https://jateng.tribunnews.com/2024/06/03/pbnu-dapat-tambang-batubara-besar-setelah-jokowi-teken-pp-minerba-ormas-keagamaan?page=all>

Solopos. (2024, June 1). Menteri Bahlil Akan Terbitkan Izin Usaha Tambang Batu Bara untuk PBNU. Retrieved from <https://news.solopos.com/menteri-bahlil-akan-terbitkan-izin-usaha-tambang-batu-bara-untuk-pbnu-1933664>